

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, 2012. Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang Negara dan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER 07/KN/2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (1976). Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Badan Urusan Piutang Negara (BUPN). Sekretariat Negara RI.

Republik Indonesia. (1976). Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang Organisasi dan Tata Kerja BUPN. Kementerian Keuangan RI.

Republik Indonesia. (1991). Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Penggabungan Fungsi Lelang ke dalam Badan Urusan Piutang Negara. Sekretariat Negara RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2001). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Republik Indonesia. (2006). Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sekretariat Negara RI.